

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Thomas dalam Murtopo (2011:1), *tax is part of the business*. Betapa pentingnya kesadaran dari para pengusaha bahwa pajak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah suatu negara menentukan ketahanan dan kelangsungan hidup suatu negara. Pendapat tersebut adalah gambaran dari *tax awareness* yang dimiliki oleh penduduk dari suatu negara maju yang bisa melihat kontribusi dari pajak bagi kemajuan negara dan kemakmuran penduduknya.

Hanya sedikit dari masyarakat kita yang mengetahui bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap anggaran pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2009 mencapai 77,99%, meningkat dari 68,07% pada tahun sebelumnya. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan anggaran penerimaan dari Migas sebesar 10,84% dan anggaran dari Bagian Laba BUMN sebesar 3,08% (diolah dari data yang disajikan pada tanggal 20 Maret 2009 dalam website Badan kebijakan Fiskal Depkeu RI, <http://www.fiskal.depkeu.go.id>).

Terkait besarnya kontribusi pajak tersebut, keengganan penduduk suatu negara dalam membayar pajak menimbulkan akibat yang secara kumulatif dapat bersifat negatif bagi negara dan juga bagi penduduknya. Pada akhirnya ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak otomatis akan berdampak negatif juga bagi kelangsungan usaha di negara tersebut.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang

memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*.

*Tax avoidance* merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen. Kapasitas penggalian pajak di Indonesia bahkan masih lebih buruk dibandingkan rata-rata rasio pajak negara miskin yang mencapai 14,3 persen (acch.kpk.go.id, 2012). Bahkan, rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 12,3 persen (economy.okezone.com, 2013).

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik

keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Ketidakselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan.

Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Pengukuran penghindaran pajak seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak langsung. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar di CGPI Tahun 2011-2014**”

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di CGPI tahun 2011-2014?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di CGPI tahun 2011-2014?
3. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama (simultan) *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di CGPI tahun 2011-2014?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di CGPI tahun 2011-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di CGPI tahun 2011-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama (simultan) *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di CGPI tahun 2011-2014

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan literatur dan

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.

## 2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya tentang tata kelola perusahaan dan perilaku penghindaran pajak.

## 3. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan persepsi positif kepada masyarakat dan pemerintah melalui pembayaran pajak dengan baik.

### 1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: variabel-variabel yang diteliti yaitu *corporate governance*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di CGPI, serta periode tahun penelitian adalah tahun 2011-2014.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi (2016) Universitas Bhayangkara Jaya sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi: latar belakang masalah mengenai peran penting laba bagi perusahaan, kaitannya terhadap perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan, serta pengaruhnya terhadap manajemen laba yang didukung dengan beberapa penelitian terdahulu menyangkut manajemen laba itu sendiri, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

#### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat: teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan terhadap manajemen

laba dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

### BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, statistik deskriptif, pengujian hipotesis serta pembahasan.

### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

